

## PEMODELAN DALAM PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN

- Bersama-sama membuat sebuah model bagi para pengambilan kebijakan dalam pengelolaan SDA
- Rencana pengelolaan SDA dan rancangan aksi pembangunan yang partisipatif untuk memperkuat pengakuan hak-hak masyarakat atas Lahan
- Menilai peluang untuk mengintegrasikan konsep kerja di lapangan dengan perencanaan pemerintah
- Aturan berbasis kelembagaan lokal dalam pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi hutan (draft)
- Pengembangan kerangka instrumen baru yang disepakati melalui lokakarya para pihak
- Proses dan kebijakan perencanaan tata guna lahan partisipatif diserahkan ke tingkat nasional
- Pemilihan lokasi proyek percontohan yang mendukung mekanisme pendanaan pro-masyarakat untuk konservasi hutan dan pengelolaan berkelanjutan

## KELEMBAGAAN

Pengembangan kelembagaan baru untuk perencanaan tata guna lahan partisipatif dan advokasi perubahan kebijakan

- Sebuah mekanisme untuk mengurangi deforestasi untuk setiap lokasi (pedoman pelaksanaan PES/REDD+) dikembangkan bersama masyarakat dan pemerintah daerah
- Organisasi masyarakat terlibat dalam pengembangan mekanisme
- Memberdayakan kelembagaan masyarakat secara hukum di tingkat kabupaten.
- Melakukan perbaikan indikator pengelolaan hutan oleh para pemangku kepentingan.
- Meningkatkan peluang masyarakat lokal mengelola hutan dengan hak atas lahan yang pasti.

## PENYADARTAHAN

Peningkatan kesadaran publik tentang perencanaan tata guna lahan kolaboratif, tenurial dan hak atas lahan, dan jasa lingkungan pada tingkat lokal dan nasional

- Penyadaran publik melalui 'pesan singkat', advokasi, program di radio dan televisi, film dokumenter, dan website
- Publikasi dari pemerintah daerah yang mendukung

keberadaan proyek.

- Menerbitkan laporan dan memberikan informasi dalam bentuk publikasi lainnya.

## Lokasi Proyek

Pemilihan lokasi mewakili karakteristik pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem hutan di Indonesia, dan mempertimbangkan faktor-faktor ancaman deforestasi, yaitu di Kabupaten Maluku Tengah (Pulau Seram) dan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

### Kabupaten Kapuas Hulu

Kalimantan Barat



### Kabupaten Maluku Tengah

Pulau Seram



Project Supported by European Union and Implemented by CIRAD and Partners

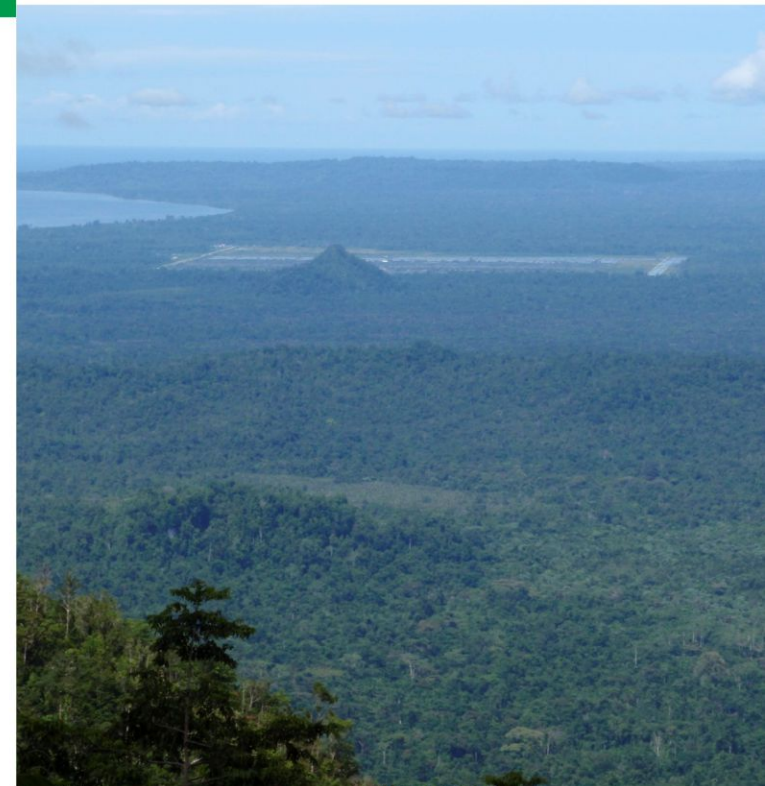


COLLABORATIVE LAND USE PLANNING AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS (CoLUPSIA)

Alamat: CIRAD - CIFOR PO BOX 0113 BOCBD Bogor 16000  
Tel.: 0251 8622622, Fax: 0251 8622100



COLLABORATIVE LAND USE PLANNING AND  
SUSTAINABLE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS (CoLUPSIA)



Perencanaan tata guna lahan kolaboratif dan penguatan kelembagaan berkelanjutan untuk memperkuat kepastian hak-hak masyarakat atas lahan dan hutan di Indonesia



## Latar Belakang

- Fungsi ekologis yang disediakan oleh hutan mengalami penurunan. Di sisi lain, masyarakat sekitar hutan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap Sumber Daya Alam (SDA), terutama hutan untuk penghidupan.
- Adanya masalah mendasar di dalam pelaksanaan pengelolaan SDA di Indonesia yaitu kurang memadainya sistem kebijakan dan perangkat-perangkat pendukungnya, informasi yang memadai dan kapasitas pelaksanaan. Permasalahan ini ditambah dengan kurangnya partisipasi pemangku kepentingan di tingkat lokal sehingga perencanaan-perencanaan formal oleh pemerintah seringkali kurang relevan, kurang dipahami dan didukung oleh mereka yang memanfaatkan sumberdaya dan terkena dampak dari sebuah perencanaan atau kebijakan.
- Kesuksesan pengelolaan SDA (termasuk upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi atau REDD) dapat dicapai melalui perbaikan perencanaan tata guna lahan kolaboratif oleh para pemangku kepentingan.

Dibutuhkan sebuah pendekatan baru untuk tujuan konservasi dan mencegah kerusakan lingkungan yaitu dengan mengembangkan mekanisme insentif atas jasa lingkungan (PES).

## Tujuan Umum Proyek

Mengurangi laju deforestasi dan kerusakan lingkungan dengan mendukung pengembangan kelembagaan yang berkelanjutan serta mendorong kebijakan dan instrumen terkait penggunaan lahan yang sesuai untuk tujuan pengembangan masyarakat kedepan.

## Tujuan khusus yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan

Menghasilkan perencanaan tata guna lahan kolaboratif dan pengelolaan SDA, yang mendorong terbentuknya kelembagaan baru, kebijakan lingkungan dan mekanisme pembiayaan yang memihak pada kelompok miskin berbasis kepastian lahan dan hak-hak masyarakat.

## Hasil Kegiatan

### PENGEMBANGAN KAPASITAS

Para pemangku kepentingan kunci memiliki kapasitas untuk melakukan perencanaan secara kolaboratif, membangun kesepakatan berkaitan dengan penguasaan dan hak atas lahan, dan mempengaruhi kebijakan.

- Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat lokal melalui pelatihan-pelatihan seperti: Metode Analisa Prospektif Partisipatif (Participatory Prospective Analysis/PPA) dan Penelitian Aksi Partisipatif (Participatory Action Research/PAR), Penilaian Kondisi Bentang Alam Partisipatif, Gender, Sosio-ekonomi dan Konsep PES termasuk REDD+
- Melakukan pemetaan kelembagaan dan analisis pemangku kepentingan
- Menyelenggarakan berbagai lokakarya dengan melibatkan para pemangku kepentingan
- Mendorong konsensus antar pihak, mitra proyek and aktor lokal dalam menjalankan peran dan tugasnya

### DATA SPASIAL

Penilaian secara partisipatif tentang kondisi penggunaan lahan terkini, peluang dan masalah di masa depan

- Pengumpulan data bersama masyarakat lokal tentang aspek sosial-ekonomi dan budaya, sistem pengelolaan SDA lokal dan interaksinya dengan sistem formal/negara
- Melakukan pemetaan tata guna lahan dan persiapan pelaksanaan mekanisme PES termasuk REDD+
- Pengukuran *karbon stok* (tumbuh-tumbuhan dan tanah), studi sistem sumber daya air (PES, inisiatif REDD+), pengumpulan data biofisik
- Melakukan penilaian SDA dan jasa lingkungan (ekologis)
- Mengembangkan Sistem Informasi Sosial-Ekologi